# KRITERIA PENETAPAN ALOKASI HUTAN PRODUKSI SERTA PENETAPAN UNIT USAHA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI[1]

HARIADI KARTODIHARDJO

## PERMASALAHAN

01 Secara umum faktor penghambat bagi penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan investasi usaha kehutanan adalah·

a Adanya kerancuan dan perbedaan persepsı dalam menjabarkan pengertıan peraturan-perundangan;

b. Masalah struktural kepemerintahan, yartu adanya overlap dengan ijin/hak yang lain,

c Masalah sosial, yaitu adanya klaim rnasyarakat;

d Masalah administrasi, yaitu adanya ijin yang tidak lagi menjalankan kegiatan di lapangan,

02. Masalah penyediaan kawasan hutan bagi pengembangan usaha kehutanan, dengan demikian, merupakan masalah teknrs, politik, sosial dan hukum Penyelesaian masalah tersebut tidak mungkin dapat efektif apabila hanya dilakukan berdasarkan pendekatan-pendekatan teknis dan memperbaiki teks kebijakan, melainkan diperlukan proses pelembagaan untuk menyediakan kawasan hutan tersebut

## TUJUAN DAN SASARAN

03. Mendapatkan alokasi kawasan hutan produksi bagi pengembangan usaha kehutanan sehingga aman dalam jangka panjang melalui kebijakan yang relevan.

04. Kebijakan tersebut disusun melalui sejumlah sasaran sbb

a Mendapatkan kejelasan mengenaı kriterıa pengalokasian kawasan hutan dan pengalokasian kawasan hutan untuk pembangunan hutan tanaman dan hutan alam;

b. Mempelajari faktor-faktor penghambat dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik baik dari pendekatan hukum, administrasi, maupun sosial;

c Menemu-kenali mekanisme hubungan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan bagi keamanan investasi usaha kehutanan,

d Merekomendasikan perbaikan danlatau pembasuan kebijakan.

## PERATURAN-PERUNDANGAN

05. Kronologi peraturan perundangan yang digunakan dalam menetapkan alokasi hutan alam dan hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi adalah sebagai berikut.

2

[1] Hasil diskusi tanggal 31 Juli (pertemuan pertama), 14 Agustus (pertemuan ke-2), 31 Agustus (paparan site plan), 4 September (pertemuan ke-3), 6 September (paparan Kalbar dan Riau), 10 September (paparan Kaltim dan Kalteng), 12 September 2007 (paparan Sumut). Bahan ini sebagai diskusi kebijakan penetapan lokasi usaja di hutan produksi oleh Departemen Kehutanan di Bogor, 23 Nopember 2007

| TANGGAL | UU/PP | SURAT KPTS/ PERMEN | ISI |
|---|---|---|---|
| 16 Maret 1990 | PP No. 7/1990 | | Ps 5: HT ditetapkan dalam HP yg tidak produktif |
| 26 April 1994 | | No. 200/1994 | **Ps 2:** HP *alam tidak produktif*<br>- Pohon inti Φ min 20 cm < 25 bt/Ha<br>- Pohon induk < 10 bt/Ha<br>- Permudaan alam<br>• Semai < 1000 bt/Ha<br>• Pancang < 240 bt/Ha<br>• Tiang < 75 bt/Ha |
| 14 Sep 1939 | UU No 4111999 | | **Penjelasan Pasal 28:** Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam |
| 6 Nop. 2000 | | No. 10.1/2000 | **Ps 3: Pedoman Pemberian Ijin HTI**<br>HT dpt dilakukan di non hutan (semak belukar padang alang2, tanah kosong) atau LOA dng pohon Φ 10 cm semua jenis < 5 m3/Ha |
| 8 Juni 2002 | PP No. 34/2002 | | **(Ps 30).** HT dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang2 atau semak belukar |
| 5 Sept 2002 | | No. 8171/2002 | Kriteria potensi HA yg dpt diberi Ijin (N/Ha, kayu komersial) |
| 5 Feb 2003 | | No. *3212003*<br>**Mencabut SK Menhut** No **10.112000** | Psl 4 (2) HT dilakukan pada semak belukar padang alang2, lanah kosong sbgmana ditetapkan dalam Kepulusan Menteri |
| 19 Okt 2004 | | P. 4812004 | Psl 3 (2) Kriteria restrorasi SK No 200/1994 **dan** SK 8171/2002 Hutan tidak produktif dm produktif yg tidak layak **untuk** IUPHHK-HA. |
| 21 Mei 2003 | | **No. 16212003** | Percepatan pembangunan hutan tanaman dengan melakukan dileniasi makro dan mikro dengan memperbolehkan penebangan hutan alam sd tahun 2009, menetapkan 10 kriteria hutan alam yang harus dipertahankan dalam IUPHHK-HT pemasok industri pulp dam kertas yang diperluas menjadi industri primer hasil hutan kayu serta pembuatan rencana percepatan oleh IUPHHK-HT |
| 24 Maret 2004 | | **No.** 10112004<br>**Mencabut SK M** No **16212003**<br>**Mengacu SK M No** 200/1994 | |
| 25 Juli 2005 | | No. 23/2005 | |
| 26 Des 2005 | | **No.4412005**<br>P.30/2005 | Dalam setiap unit pengelolaan dapat diterapkan **lebih** dari satu sistem silvikultur |
| 8 Juni 2007 | PP No. 6/2007 | | **(Ps** 38) HT dilaksanakan pada HP yg **tidak produktif** HP tidak produktif harus berupa lanah kosong, alang2 dan/atau semak **belukar (Ps** 36 - restorasi)<br>Pemanfaatan hasil hutan kayu pada MTI dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan **satu atau** lebih **sistem silvikultur** |
| 28 Mei 2007 | PP No 6/2007 (Ps 68) | No 19/2007 | Ijin dan Perluasan IUPHHK-HT areal **tdk produktif** areal yg tdk dibebani hak |
| 7 Juni 2007 | PP No *612007* (Ps 68) | No 20/2007 | Area' yg dimohon IUPHHK-HA: **areal eks** HPH. areal yg tdk dibebani hak |
| **25** Juni 2007 | PP No 6/2007 (Ps **40)** | No 23/2007 | Areal **yg** dimohon IUPHHK-HTR areal tdk produktif areal yg tdk dibebani hak |

06. Berdasarkan isi peraturan-perundangan di atas, alokasi hutan produksi mengikuti dua pokok pengertian, yaitu:

a Tidak produktif karena potensi tegakan tinggal tidak memungkinkan untuk dapat dikelola berdasarkan sistem silvikultur TPTI. SK Menhut No 20011994 menetapkan pohon inti, pohan induk, pancang, tiang dan semai kurang dari jumlah tertentu sebagai batasan hutan produksi yang tidak produktif Pengertian trdak produktif seperti ini juga ada dalam SK Menhut 10 112000, dimana hutan tidak produktif karena berupa semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong serta areal bekas tebangan yang mempunyai kayu bulat berdiameter 30 cm semua jenis kurang dari 5 m3 (diinterpretasikan sebagai jurnlah pancang kurang dari 300 batang/Ha).

b. Tidak dapat dikelola dengan sistem silvikultur TPTI karena secara ekonomi tidak layak SK Menhut No. 817112002 menetapkan kriteria hutan alam (N/Ha dari kayu komersial) yang dapat diberi IUPHHK HA;

07. Berdasarkan kriteria alokasi di atas dan hasil diskusi dapat dicatat hal-hal berikut:

a Belum terdapat acuan yang mengatur hutan yang tidak memenuhi untuk dijadikan hutan tanaman tetapi potensinya tidak cukup besar sehingga juga tidak layak diberi IUPHHK HA:

b. Hamparan luas yang cukup dan memenuhi kriteria di atas seringkali tidak dapat secara mudah ditemukan di lapangan Kenyataan seperti ini perlu ditekankan pengaturan yang dilakukan dalarn lingkup unit pengelolaan, seperti enclave hutan alam yang terdapat di dalam kawasan hutan tanaman dan upaya konservasi tanah untuk kelerengan tertentu (8 % - 25%; SK Menhut No 10 1/2000), serta perlindungan kawasan hutan produksi dengan nilai konservasi tinggi/HCVF (SK Menhut No 10112004).

c Dengan adanya TPTI-I (SILIN) perlu penekanan implementasinya berada dalam areal bekas tebangan. Demikian pula dalam pelaksanaan restorasi di hutan produksi diperlukan kejelasan kriteria, terutama masih terdapatnya hutan alam sebagai sumber plasma nutfah;

d. Penjelasan adanya kebijakan restrukturisasi industri menunjukkan perlunya penunjukkan kawasan tertentu di propinsi/kabupaten/kota tertentu sebagar sumber bahan baku industri. Berarti wilayah-wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan alam, hutan tanaman atau restorasi hutan produksi melalui kriteria kebutuhan bahan baku industri;

e Penjabaran lebih lanjut adanya peluang untuk menetapkan lebih dari satu sistem silvikultur dalam satu unit pengelolaan hutan diperlukan sebagai solusi atas masalah di atas Dalam hal ini, karakteristik hutan produksi seperti di Papua maupun Nusa Tenggara perlu diperhatikan

## ARAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN ALOKASI HUTAN PRODUKSI

08. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, kebijakan alokasi hutan produksi untuk usaha hutan alam, hutan tanaman dan restorasi adalah sebagai berikut.

a Untuk setiap propinsi, Menteri diharapkan dapat menetapkan alokasi/dileniasi makro **kawasan** hutan produksi untuk usaha hutan alam, hutan tanaman dan restorasi. Alokasi makro ini didasarkan pada:

- Penutupan lahan
  **Cuas** sesuai kebutuhan minimal kelayakan usaha
- Kelas lereng
- Potensi tegakan
- Akses – Potensi konflik
- Kawasan dengan nilai konservasi tinggi/HCVF

| USULAN PEMANFAATAN | PENUTUPAN LAHAN | LUAS | KELAS LERENG | POTENSI TEGAKAN | AKSES - POTENSI KONFLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hutan Alam** | | | | | |
| - TPTI | Hp. Hs | Min 35 000 Ha | A. B **C , D** | Min N/Ha jenis niaga | Rendah – rendah |
| - TPTII | Hs | - | **A**, B, **C**.D | Log over area | |
| **Restorasi HP** | Hp Hs Hmp, Hms Hr, Hrs, B, Br T (**ada** gene pool) | Min *35 000 Ha* | **A** B, C, D, E | Luasan sesuai **MA** < 35 000 Ha | - |
| **Hutan Tanaman** | Hs, B, T | HTI – min 17.000 Ha; HTR - min 15 Ha | **A.B** C | Φ 10-19 cm < 108<br>Φ 20-49 cm < 39<br>Φ 50 cm < 15 | Tinggi – sedang/tinggi |
| **HCVF** | Hp, Hs, Hmp, Hms. Hr, Hrs B Br T | - | E, D | Harmonisasi kriteria SK 101/04 dan FSC [1] | - |
| **HHBK** | Hp, Hs, Hmp, Hms Hr, **Hrs**, B, Br, T | | A, B, C, D, E | - | Tinggi – sedang/tinggi |

Keterangan: 1). Dalam kriteria FSC, HCVF termasuk hutan yang mempunyai potensi HHBK yang dapat dimanfaatan oleh masyarakat.

b Setiap unit pengelolaan atau pemegang ijin melaksanakan penetapan alokasi/dileniasi mikro untuk mengetahui

- Jenis sistem silvikultur yang diterapkan (TPTI. TPTII, Restorasi HP. THPB) dan lokasinya
- Lokasi-lokasi kawasan lindung dan HCVF yang perlu dikelola secara khusus

09 Sejalan dengan PP No 6/2007, bentuk alokasi pemanfaatan hutan produksi berupa IUPHHK-HA, IUPHHK-HT. Restorasi HP, HTR. HKm, IUPHHBK Disebutkan pula bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Ketentuan ini dapat digunakan dan sangat menentukan dalam penetapan unit usaha komersial (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTR. Hkm, IUPHHBK) di dalam kawasan hutan produksi, serta ijin dan pengelolaan Hutan Desa maupun Hutan Adat Kombinasi jenis silvikultur yang **akan** diterapkan, lokasi perlindungan hutan, serta bentuk perijinan dapat mengikuti skema berikut

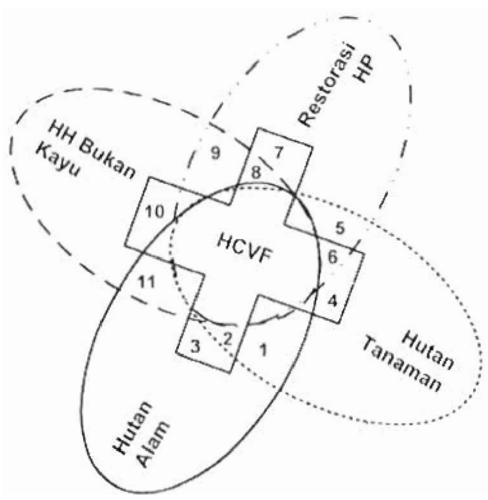


KETERANGAN
1. Sistem silvikultur dapat berupa TPTI dan THPB
2. Sistem silvikultur dapat berupa TPTI dan THPB dan pengelolaan HCVF
3. Sistem silvikultur TPTI dengan HCVF
4. Sistem silvikultur THPB dengan HCVF
5. Restorasi hutan produksi dan THPB
6. Restorasi hutan produksi dan THPB dengan pengelolaan HCVF
7. Restorasi hutan produksi dan pengelolaan HCVF
8. Restorasi hutan produksi dan HHBK dan pengelolaan HCVF
9. Restorasi hutan produksi dan pengeolaan HHBK
10. Pengelolaan HHBK dan HCVF
11. Sistem silvikultur TPTI dan pengelolaan HHBK

## STATUS HUTAN PRODUKSI DAN KRITERIA ALOKASI KAWASAN

10 Berdasarkan presentasi lima propinsi: Kalbar, Riau, Kaltim, Kalteng, Sumut, dapat diketahui bahwa kondisi kawasan hutan produksi **saat** ini dapat drbedakan a/. Terdapat unit manajemen yang telah mendapat ijin dan b/. Tidak terdapat unit manajemen Kedua kondisi tersebut dapat overlap dengan perijinan lain maupun klaim masyarakat. Sedangkan kondisi pertama (a/ ) meskipun telah terdapat unit manajemen namun dapat tidak ada kegiatan di lapangan oleh berbagai sebab. Secara struktural, status kawasan hutan produksi dapat sesuai dengan RTRWK/P atau tidak sesuai dengan RTRWK/P. Hal-hal tersebut menyebabkan hutan produksi yang tidak dibebani hak tidak berarti selalu dapat diberikan hak di atasnya, dengan kondisi sebagai berikut

| MASIH TERDAPAT KLAIM PIHAK SATU TERHADAP PIHAK LAINNYA | MASIH TERDAPAT PERBEDAAN PENGGUNAAN ACUAN HUKUM (TGHK, PADU-SERASI, RTRWP, RTRWK) | |
|---|---|---|
| | TIDAK | YA |
| TIDAK | **A.** IUPHHK baru = tidak tumpang tindih hak dan ijin sah lain serta tidak ada klaim pihak lain | **B.** IUPHHK baru = tumpang tindih hak dan ijin yg sah lain meskipun tidak ada klaim prhak lain |
| YA | **C.** IUPHHK baru = tidak tumpang tindih hak dan ijin yg sah lain namun ada klaim pihak lain | **D.** IUPHHK baru = tumpang tindih hak dan ijin yg sah lain serta ada klaim pihak lain |

11. Kecuali kelompok A, penyelesaian status kawasan hutan produksi perlu ditetapkan mekanismenya

ooo